BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai kolaborasi Pentahelix dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak di UPT PPRSA Inang Matutu menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor bukan hanya menjadi strategi, tetapi juga merupakan kebutuhan penting dalam menjawab kompleksitas permasalahan rehabilitasi sosial anak terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menegaskan bahwa tidak ada satu aktor pun yang mampu bekerja sendiri dalam menangani isu kerentanan anak, sehingga kolaborasi antar unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media menjadi sebuah keniscayaan.

Meskipun kolaborasi telah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal kesetaraan peran, keberlanjutan program, serta komitmen antar helix. Namun demikian, setiap unsur memberikan kontribusi nyata yang saling melengkapi dalam memperkuat sistem layanan rehabilitasi sosial anak. Adapun Kesimpulan peran pentahelix yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui UPT PPRSA Inang Matutu berfungsi sebagai penggerak utama dan simpul koordinasi dalam pelayanan rehabilitasi anak. Pemerintah telah menjadi motor penggerak pelayanan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menyediakan dasar regulatif bagi kolaborasi. Dampaknya terlihat dari

meningkatnya efektivitas layanan dan keterbukaan koordinasi dengan pihak luar. Namun, peran pemerintah masih berada pada tahap transisi dari pola birokratis menuju model kolaboratif, sehingga perlu memperluas ruang partisipasi dan inovasi bersama aktor lain agar kolaborasi lebih seimbang dan berkelanjutan.

2. Akademisi memberikan kontribusi ilmiah melalui penelitian, kuliah kerja nyata (KKN), dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada isu anak dan kesejahteraan sosial. Dampak dari keterlibatan akademisi terlihat pada penguatan kapasitas pengetahuan, pengembangan model layanan berbasis riset, dan peningkatan kesadaran ilmiah di lingkungan kerja UPT. Namun, kolaborasi ini belum sepenuhnya terstruktur karena masih minimnya kesinambungan dan monitoring terhadap hasil riset atau kegiatan pengabdian. Ke depan, akademisi perlu berperan lebih strategis sebagai mitra sejajar dalam inovasi kebijakan dan praktik pelayanan.
3. Sektor dunia usaha berperan dalam memberikan dukungan sumber daya material dan pelatihan keterampilan melalui program CSR, yang berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kemandirian anak. Dunia usaha juga memperoleh manfaat citra sosial dan peningkatan empati karyawan. Namun, sebagian besar kontribusi masih bersifat sementara dan seremonial, belum menyentuh komitmen jangka panjang yang dapat menjamin keberlanjutan program rehabilitasi. Diperlukan kebijakan kemitraan

yang lebih terstruktur agar CSR menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi berkelanjutan.

4. Komunitas menunjukkan peran yang kuat dalam proses penjangkauan kasus, pendampingan sosial, serta penguatan jaringan sosial di tingkat akar rumput. Dampak yang muncul adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat, tumbuhnya solidaritas sosial, serta hadirnya dukungan emosional bagi anak dan keluarga. Namun, peran komunitas masih belum terlembagakan secara formal dan bergantung pada inisiatif sukarela. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas, pelatihan, serta pembentukan forum kolaboratif lintas aktor agar partisipasi masyarakat lebih sistematis dan berdaya guna.
5. Media berperan penting dalam meningkatkan visibilitas, transparansi, dan kesadaran publik terhadap isu perlindungan anak. Melalui publikasi berita dan kampanye sosial, media membantu memperluas akses informasi layanan rehabilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Dampak positif lainnya adalah terbangunnya ruang komunikasi publik lintas sektor yang memperkuat jejaring kolaborasi antar helix. Namun, peran media masih didominasi pada tahap informasi dan promosi. Ke depan, perlu penguatan kapasitas media agar dapat berperan lebih advokatif dan edukatif dengan menjunjung etika peliputan anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi Pentahelix di UPT PPRSA Inang Matutu telah menjadi model kerja kolaboratif yang progresif, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi struktur, mekanisme koordinasi, dan kesinambungan komitmen. Dampak yang dihasilkan terlihat dalam peningkatan efektivitas pelayanan, perluasan jaringan sosial, penguatan kapasitas aktor, serta meningkatnya kesadaran publik terhadap isu perlindungan anak.

Arah perkembangannya menunjukkan bahwa tata kelola sosial berbasis kolaborasi Pentahelix berpotensi menjadi pendekatan strategis dalam mewujudkan pelayanan rehabilitasi anak yang berdaya, berkeadilan, dan berkelanjutan, dimana setiap unsur tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi mitra sejajar dalam membangun sistem perlindungan anak yang inklusif dan humanis.

B. Rekomendasi

Untuk mencapai bentuk kolaborasi pentahelix yang ideal dalam pelayanan rehabilitasi anak di UPT PPRSA Inang Matutu, masih diperlukan sejumlah langkah penguatan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Upaya ini penting agar sinergi antaraktor pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dapat berjalan lebih efektif, setara, dan berorientasi pada hasil nyata bagi perlindungan serta pemulihan anak.

1. Peningkatan kapasitas koordinasi lintas aktor perlu dilakukan melalui pembentukan *forum komunikasi tetap* antar unsur pentahelix. Forum ini berfungsi sebagai ruang koordinasi rutin,

wadah berbagi praktik baik, dan sarana perumusan program bersama. Melalui forum yang terstruktur, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator sekaligus penjamin keberlanjutan kolaborasi, sehingga setiap aktor memiliki peran yang jelas dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

2. Perlu adanya integrasi hasil riset akademik ke dalam kebijakan publik. Hasil penelitian dari perguruan tinggi dan lembaga akademik dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), khususnya dalam penyusunan program rehabilitasi anak. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga reflektif terhadap kebutuhan nyata di lapangan dan memiliki legitimasi ilmiah yang kuat.
3. Perlu dilakukan penyusunan mekanisme kemitraan formal antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas. Mekanisme ini dapat berupa nota kesepahaman (*MoU*), perjanjian kerja sama, atau model kelembagaan kolaboratif yang memastikan keberlanjutan kegiatan lintas sektor. Melalui kemitraan formal, program CSR dunia usaha, kegiatan sosial komunitas, dan kebijakan pemerintah dapat disinergikan dalam satu kerangka kerja yang berkelanjutan dan saling menguatkan.
4. Penguatan peran media dan komunitas menjadi hal yang krusial. Kedua aktor ini memiliki potensi besar sebagai agen advokasi dan edukasi publik. Media dapat berperan dalam membangun

kesadaran sosial mengenai hak anak, menyebarluaskan informasi yang edukatif, serta mengangkat narasi positif tentang upaya rehabilitasi sosial. Sementara komunitas, dengan kedekatannya terhadap masyarakat, dapat menjadi jembatan antara lembaga formal dan penerima manfaat, sehingga pesan-pesan perlindungan anak dapat diterima secara lebih luas dan membentuk budaya peduli anak di masyarakat.

C. Produk Tesis

Sebagai tindak lanjut dari penelitian mengenai kolaborasi pentahelix dalam pelayanan rehabilitasi anak di UPT PPRSA Inang Matutu, penulis merumuskan sebuah produk tesis berupa Policy Brief **"Dari Koordinasi ke Kolaborasi: Model Forum Komunikasi Pentahelix untuk Perlindungan Anak"**

Policy brief ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Dinas Sosial, dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor di bidang pelayanan rehabilitasi sosial anak.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, policy brief ini menawarkan solusi berupa pembentukan Forum Komunikasi Pentahelix Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi tetap yang berfungsi mengintegrasikan peran dan sumber daya dari setiap unsur Pentahelix, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan dalam pelayanan sosial anak.

Pemilihan policy brief sebagai bentuk produk tesis didasarkan pada pertimbangan bahwa dokumen ini bersifat praktis, komunikatif, dan strategis dalam menyampaikan hasil penelitian kepada pengambil kebijakan. Policy brief juga menjadi sarana advokasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mampu mengubah hasil penelitian akademik menjadi masukan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat daerah.

Selain itu, policy brief ini diharapkan dapat menjadi model tata kelola kolaboratif yang dapat direplikasi di daerah lain, khususnya dalam bidang pelayanan sosial anak. Dengan adanya produk ini, penelitian tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep kolaborasi Pentahelix, tetapi juga menghasilkan produk kebijakan yang aplikatif dan berdampak langsung terhadap penguatan sistem perlindungan anak di Sulawesi Selatan.